

RINGKASAN

Indeks Demokrasi Indonesia

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2018



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

RINGKASAN

Indeks Demokrasi Indonesia

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2018



RINGKASAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2018

No. ISSN	: 2528-2131
No. Publikasi	: 53520.1915
Katalog	: 4601009.53
Jumlah halaman	: xii+ 46 halaman
Ukuran	: 26 cm x 18 cm
Naskah	: Bidang Statistik Sosial
Penyunting	: Bidang Statistik Sosial
Gambar Kulit	: Bidang Statistik Sosial
Diterbitkan oleh	: ©Badan Pusat Statistik Provinsi NTT
Dicetak oleh	: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk
tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENULIS
RINGKASAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2018

Anggota Tim Penyusun:

Pengarah : Maritje Pattiwaellapia, S.E., M.Si

Penyunting : Ir. Desmon Sinurat

Alberth Christian Lulan, SST., M. Si

Penulis : Dewi Rara

Pengolah Data: Dewi Rara

Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018 menyajikan gambaran capaian demokrasi di Nusa Tenggara Timur dalam perspektif indeks demokrasi Indonesia. Nilai indeks ini diperoleh dari pengumpulan data melalui 3 tahapan yakni review koran dan dokumen, *Focus Group Discussion* (FGD), dan Wawancara Mendalam terkait kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI tersusun dari 28 indikator, 11 variabel dan 3 aspek demokrasi. Interpretasi indeks ini diklasifikasikan dalam 3 kategori, yakni klasifikasi “baik” nilai indeks 80-100; klasifikasi “sedang” nilai indeks 60-80, dan klasifikasi “buruk” nilai indeks 0- 60.

Hasil perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia hingga tahun 2018 ini telah membawa capaian demokrasi Nusa Tenggara Timur pada tingkatan/klasifikasi indeks yang “baik”, dengan nilai indeks sebesar 82,32. Nilai ini meningkat 6,81 poin jika dibandingkan tahun sebelumnya, sebesar 75,51. Peningkatan nilai indeks ini merupakan andil meningkatnya seluruh nilai aspek demokrasi diantaranya; nilai aspek kebebasan sipil menjadi sebesar 94, nilai aspek hak-hak politik 71,85, dan aspek lembaga demokrasi sebesar 84,28. Peningkatan nilai aspek tertinggi secara berurut dicapai oleh aspek kebebasan sipil meningkat sebesar 14,31 poin , aspek lembaga demokrasi sebesar meningkat 4,89 poin, dan aspek hak-hak politik meningkat 2,1 poin.

Selain itu, peningkatan nilai IDI, juga merupakan andil dari 11 variabel IDI dimana seluruh variabel mengalami peningkatan kecuali 3 variabel yang nilainya tetap karena capaian indeks 2 variabel (variabel peran partai politik dan peran peradilan yang independent) telah mencapai nilai 100 dan 1 variabel (variabel pemilu yang bebas dan adil) senilai 97,47 yang nilainya merujuk pada pileg 2014 sehingga nilai indeks pasti akan konsisten dalam 5 tahun hingga proses pileg selanjutnya. Variabel dengan nilai indeks tertinggi adalah variabel kebebasan berkeyakinan, variabel pemilu yang bebas dan aktif, dan variabel peran peradilan yang independen dengan capaian nilai indeks masing-masing 100. Nilai indeks terendah untuk variabel peran birokrasi pemerintah daerah sebesar 60,82.

Lebih dalam melihat capaian indikator-indikator dalam IDI selama tahun 2018, terdapat 17 indikator dengan nilai indeks klasifikasi baik dalam rentang nilai 81,25 -100; 6 indikator dengan nilai indeks klasifikasi sedang dalam rentang nilai 62,50 – 73,68 ; 5 indikator dengan nilai klasifikasi buruk dalam rentang nilai 41,67 – 50,00. Indikator- indikator IDI tahun 2018 yang berada klasifikasi buruk yang perlu menjadi perhatian diantaranya; indikator ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi, demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan, rekomendasi DPRD terhadap eksekutif, dan upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah.

Kata Pengantar

BPS mulai terlibat langsung dalam penyusunan IDI, sejak 2009. Oleh karena itu, publikasi ini berupaya menyajikan data IDI sejak tahun 2009 hingga tahun 2018 agar dapat melihat perkembangan IDI sesuai komponen IDI.

Pengumpulan data IDI berbeda dengan kegiatan survei BPS lainnya. IDI menggabungkan survei kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui review surat kabar dan review dokumen. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui focus group discussion (FGD) dan wawancara mendalam (*in-depth interview*).

Sampai saat ini IDI merupakan satu-satunya ukuran kuantitatif untuk mengetahui tingkat kemajuan demokrasi di tingkat provinsi. Terkait dengan hal tersebut, keberadaan IDI menjadi sangat penting bagi perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi.

Terbitnya buku ini semoga dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kondisi demokrasi wilayah masing-masing. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga diperoleh angka indeks tahun 2018, disampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya

Kupang, Oktober 2019

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Maritje Pattiwaellapia, S.E., M.Si

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif.....	iv
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Gambar	x
Daftar Tabelxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	1
1.3 Ruang Lingkup	2
1.4 Sistematika Penyajian	2
BAB II PENJELASAN TEKNIS.....	3
2.1 Jenis dan Sumber Data	3
2.2 Konsep dan Definisi	5
2.3 Metode Pengumpulan Data IDI.....	17
BAB III PEMBAHASAN	19
Lampiran.....	35

Daftar Gambar

Gambar 1.	Perkembangan IDI Nusa Tenggara Timur dan IDI Nasional , 2009-2018.....	19
Gambar 2.	Perkembangan Aspek IDI Nusa Tenggara Timur, 2009-2018.....	21
Gambar 3.	Keterbandingan IDI Nusa Tenggara Timur.....	32

<https://ntt.bps.go.id>

Daftar Tabel

Tabel 1.	Nilai Indeks 11 Variabel IDI NTT Tahun 2017-2018.....	24
Tabel 2.	Nilai Skor Indikator-indikator Aspek Kebebasan Sipil Tahun 2017-2018.....	26
Tabel 3.	Nilai Skor Indikator-indikator Aspek Hak-hak Politik Tahun 2017-2018.....	27
Tabel 4.	Nilai Skor Indikator-indikator Aspek Lembaga Demokrasi Tahun 2017-2018.....	30
Tabel 5.	Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2009	37
Tabel 6.	Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2010	38
Tabel 7.	Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2011	39
Tabel 8.	Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2012	40
Tabel 9.	Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2013	41
Tabel 10.	Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2014	42
Tabel 11.	Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2015	43
Tabel 12.	Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2016	44
Tabel 13.	Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2017	45
Tabel 14.	Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2018	46

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan otonomi daerah telah berjalan belasan tahun, menciptakan keragaman berbagai aspek regional, salah satunya adalah keragaman pelaksanaan demokrasi yang dalam beberapa hal dapat mengarah pada perubahan nilai-nilai demokrasi.

Dengan demikian, di dalam RPJP tertuang perencanaan pembangunan yang memperkuat upaya konsolidasi demokrasi dan memperdalam budaya demokrasi di Indonesia. Namun untuk perencanaan pembangunan tersebut membutuhkan suatu alat untuk menilai capaian demokrasi sampai tingkat daerah.

Bappenas dan UNDP bersama-sama dengan Kemenkopolkam, Kemendagri, BPS, pemerintahan Provinsi dan organisasi masyarakat sipil serta akademisi seluruh Indonesia berupaya menyusun suatu alat untuk mengukur kinerja demokrasi Indonesia.

1.2 Maksud dan Tujuan

Publikasi Ringkasan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan data capaian demokrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahun secara berkala. Ketersediaan data dapat menjadi bahan perencanaan dan evaluasi terkait capaian demokrasi. Selain itu, publikasi ini menggambarkan perkembangan demokrasi di Provinsi Nusa Tenggara

Timur sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam upaya penyelenggaraan demokrasi.

1.3 Ruang Lingkup

Ringkasan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018 menyajikan 28 indikator, 11 Variabel, dan 3 Aspek Indeks Demokrasi Indonesia. Data yang disajikan merupakan hasil perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2018 yang diperoleh melalui tiga tahapan pengumpulan data yakni, review koran dan dokumen, *Focus Group Discussion* (FGD), dan wawancara mendalam. Ketiga tahapan tersebut merupakan proses pencarian seluruh kejadian dan aturan di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berkaitan dengan demokrasi selama kurun waktu 2018.

1.4 Sistematika Penyajian

Secara keseluruhan, publikasi ini disajikan dalam beberapa bab yang tersusun sistematis. Bab Pendahuluan (Bab I) menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan sistematika penyajian. Bab Penjelasan Teknis (Bab II) menyajikan penjelasan teknis terkait jenis dan sumber data, (Bab III) menyajikan pembahasan hasil perhitungan IDI Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB II PENJELASAN TEKNIS

2.1 Jenis dan Sumber Data

Data terkait Indeks Demokrasi Indonesia 2018 bersumber dari 3 tahapan pengumpulan data dalam penyusunan indeks yakni;

a. Review koran

Dalam melakukan review surat kabar, terlebih dahulu ditentukan salah satu surat kabar terpilih di setiap provinsi. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan surat kabar diantaranya independensi, kontinuitas, dan oplah terbesar. Surat Kabar yang saat ini memenuhi hal tersebut adalah SKH Pos Kupang pada periode 1 Januari – 31 Desember tiap tahunnya. BPS RI Review surat kabar dilakukan untuk beberapa indikator diantaranya; indikator 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 16, 17, 18, 23, 27, dan 28.

Surat kabar telah dipilih sejak IDI 2007 ditentukan berdasarkan:

- a. Oplah terbesar
- b. Independensi
- c. Kontinuitas

b. Review Dokumen

Berbagai dokumen yang menjadi obyek review, utamanya yang dikeluarkan oleh pemerintah, pada umumnya adalah dokumen yang mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah dan atau masyarakat di tingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota.

Beberapa dokumen tersebut antara lain:

1. Berbagai aturan tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah
2. Surat keputusan KPU tentang penetapan anggota DPRD
3. Laporan pertanggungjawaban kepala daerah
4. Lampiran 2 Perda APBD perubahan
5. Berbagai peraturan daerah yang telah disahkan pada tahun berjalan
6. Berbagai surat rekomendasi resmi yang dikeluarkan DPRD
7. Laporan kegiatan berbagai partai politik
8. Surat keputusan penetapan pengurus dari berbagai partai politik

c. Focus Group Discussion (FGD)

FGD memiliki peranan penting dalam upaya untuk meminimalkan “bias” dari informasi yang peroleh melalui review media dan dokumen. FGD sebagai sumber data utama yang akan digali informasi, pengalaman, serta pengetahuan yang terkait indikator. Tujuan utama dari penggunaan FGD adalah untuk menjangkau data kualitatif berkaitan dengan aspek, variabel, dan indikator IDI. Secara khusus, tujuan FGD:

1. Mengkonfirmasi fakta yang terkait dengan temuan review surat kabar dan dokumen.
2. Menambah informasi terkait dengan kasus-kasus yang dianggap besar/menarik.
3. Menelusuri kasus-kasus yang relevan dan belum tercatat dalam data review surat kabar dan dokumen.

d. **Wawancara mendalam**

Dalam penyusunan IDI, in-depth interview digunakan untuk melakukan verifikasi dan pendalaman informasi yang telah diperoleh melalui review media dan dokumen serta FGD. In-depth interview diperankan bukan sebagai metode utama dalam proses pengumpulan data, tetapi lebih bersifat komplementer karena melengkapi ketiga metode lainnya. Wawancara mendalam digunakan untuk melakukan verifikasi dan pendalaman informasi yang telah diperoleh melalui review surat kabar dan dokumen serta FGD. Dalam proses pengumpulan data, wawancara mendalam bersifat komplementer melengkapi ketiga metode lainnya. Meskipun in-depth interview bersifat komplementer terhadap metode pengumpulan data lainnya, namun memiliki peran yang tidak kalah penting karena berperan sebagai “pos” terakhir dalam penjarangan data kualitatif. Lebih dari itu, *indepth interview* juga berperan sebagai “filter” dalam megurangi bias informasi berkaitan dengan aspek, variabel dan indikator IDI

Tujuan dilaksanakan WM:

1. Mendapatkan keterangan lebih rinci tentang hal-hal yang belum didapatkan baik dalam koding surat kabar, koding dokumen dan FGD.
2. Mendapatkan keterangan tentang fenomena baru.
3. Menggali informasi yang mungkin tidak dapat dijelaskan di muka umum.

2.2 Konsep dan Definisi

2.2.1 Aspek 1: KEBEBASAN SIPIL

Kebebasan Sipil adalah kebebasan setiap individu sebagai warga negara yang dijamin oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Negara harus memberikan penghormatan dan perlindungan atas kebebasan sipil masyarakat, sejauh pelaksanaan kebebasan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan sebagai landasan hukum formal. Diluar itu, kebebasan juga tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dan menjadi pandangan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip:

1. Ketertiban Umum (*public order*)
2. Norma Moral (*public moral*)
3. Norma Kesehatan (*public health*)
4. Keselamatan Umum (*public safety*)
5. Mengurangi/mengganggu kebebasan orang lain

Aspek kebebasan sipil dalam IDI terdiri dari empat variabel yaitu, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Jumlah seluruh indikator yang digunakan dalam pengukuran aspek kebebasan sipil berjumlah 10 indikator.

1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat

Kebebasan Berkumpul dan Berserikat adalah kebebasan bagi semua orang untuk mengadakan/mengikuti pertemuan/rapat dan bergabung dengan berbagai organisasi yang tidak bertentangan

dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan/mengganggu kepentingan umum.

- Indikator 1. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.
- Indikator 2. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.

2. Kebebasan Berpendapat

Kebebasan yang melanggar peraturan perundangan dan bertentangan/mengganggu kepentingan umum bukanlah kebebasan yang dimaksudkan oleh demokrasi.. Kata kunci dari kegiatan berkumpul dalam IDI adalah: pertemuan dua orang atau lebih dengan satu tujuan bersama selama tidak berbenturan dengan aturan perundangan serta norma yang berlaku. Kebebasan Berpendapat, adalah kebebasan individu untuk menyampaikan pikiran, pendapat, pandangan, kehendak, perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis dan pembatasan. Kebebasan berpendapat harus dilakukan secara bebas dan bertanggungjawab

- Indikator 3. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat

- Indikator 4. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat.

3. Kebebasan Berkeyakinan

Kebebasan Berkeyakinan, adalah kebebasan individu/kelompok masyarakat untuk menjalankan agama atau keyakinan yang dianutnya tanpa adanya paksaan ataupun hambatan dari siapapun. Dalam konteks kebebasan berkeyakinan, yang dimaksud membatasi kebebasan adalah:

1. Adanya aturan tertulis dan tindakan atau pernyataan pejabat atau masyarakat yang mengharuskan atau melarang masyarakat melaksanakan kegiatan keagamaan tertentu
2. Adanya prosedur administratif yang berbelit/mempersulit bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinannya Catatan: Dalam hal ini, mendirikan rumah ibadah termasuk menjalankan keyakinan.

- Indikator 5. Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan agamanya.
- Indikator 6. Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya.
- Indikator 7. Ancaman Kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait ajaran agama.

Aturan tertulis yang dimasukkan adalah aturan tertulis yang pada tahun 2015 masih berlaku (secara hukum sifatnya masih mengikat), tanpa melihat tahun terbitnya. Tidak termasuk dalam indikator ini adalah aturan tertulis yang pada tahun 2018 masih dalam proses penyelesaian (belum disahkan). Aturan tertulis (Indikator 5 dan 8) yang dicakup dalam indikator IDI adalah seluruh aturan tertulis yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pemerintah daerah dalam hal ini meliputi Gubernur, Bupati/Walikota, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), DPRD, pemerintah kecamatan, pemerintahan desa/kelurahan, atau struktur birokrasi pemerintahan daerah lainnya. Aturan tertulis yang terkait dengan indikator 1 dan 2 dimasukkan pada indikator 8. Aturan tertulis dapat berbentuk Perda, Pergub, Perbup, Perwako, Surat keputusan, Surat edaran, Surat perintah, atau surat-surat yang sifatnya formal/resmi lainnya.

4. Kebebasan dari Diskriminasi

- Indikator 8. Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya.
- Indikator 9. Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya.
- Indikator 10. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya.

Kebebasan dari Diskriminasi, secara garis besar, diskriminasi adalah perlakuan yang membedakan individu warga negara dalam hak dan kewajiban yang dimiliki, dimana perbedaan tersebut didasarkan pada alasan gender, agama, suku/ras, umur, status kerentanan semisal ODHA, orientasi seksual maupun hambatan fisik. Sedangkan dalam pengertian spesifiknya, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan atas pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Diskriminasi gender adalah perlakuan yang berbeda yang tidak adil terhadap perempuan atau terhadap laki-laki saja.

Diskriminasi etnis adalah perlakuan yang berbeda yang tidak adil terhadap sekelompok etnis tertentu. Ancaman atau tindakan yang tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap etnis atau memberikan keistimewaan perlakuan terhadap etnis tertentu.

Diskriminasi kelompok rentan lainnya adalah perlakuan yang berbeda yang tidak adil terhadap kelompok tertentu seperti para manula, anak-anak, orang miskin, penyandang cacat, dan pengidap penyakit tertentu misalnya ODHA.

Ancaman kekerasan adalah suatu usaha yang dilakukan secara konsepsional yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan atau

bahaya yang disampaikan baik secara lisan di hadapan khalayak, secara lisan melalui telepon, SMS, atau melalui tulisan. Bentuk ancaman dapat berupa verbal (kata-kata) maupun bahasa tubuh (gesture). Ancaman tidak harus berupa ucapan yang mengancam, bahkan tindakan pelarangan sudah termasuk kategori ancaman.

Penggunaan kekerasan, adalah suatu aktifitas yang merusak secara fisik terhadap tubuh/anggota badan, bangunan, atau fasilitas umum. Kekerasan termasuk kekerasan yang dilakukan aparat kepada sesama aparat serta kekerasan yang dilakukan masyarakat kepada aparat.

Membatasi adalah tindakan atau pernyataan yang membuat orang (berlaku baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain), untuk mengurangi, merintangi, menentukan banyaknya, atau tidak membolehkan seseorang untuk melakukan aktifitas tertentu.

Mewajibkan adalah tindakan atau pernyataan yang bermaksud mengharuskan seseorang melakukan sesuatu aktifitas tertentu.

Masyarakat, adalah seluruh elemen di luar birokrasi pemerintahan. Termasuk masyarakat adalah organisasi (FPI, PGI, Walubi), perusahaan, dan individu.

Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaankegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Aparat pemerintah, adalah seluruh jajaran birokrasi pemerintah, baik sipil maupun militer, baik pejabat maupun staf.

Termasuk dalam kategori aparat pemerintah adalah kepala desa dan petugas satpol PP. Law enforcement. Tindakan aparat pemerintah (misal: sweeping) yang dilakukan berdasarkan aturan tertulis yang berlaku. Tindakan tersebut termasuk pada kategori penegakan hukum, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk hambatan kebebasan sipil. Enumerator dapat melacak keberadaan aturan tertulis tersebut dan dimasukkan ke dalam aturan tertulis yang membatasi pada indikator yang sesuai.

Tindakan pejabat pemerintah, adalah perbuatan pejabat pemerintah dalam bentuk penangkapan, penggerebekan, atau penutupan. Pernyataan pejabat, adalah semua ucapan yang dikutip di dalam koran.

Pejabat, adalah semua aparat pemerintahan baik sipil maupun militer, seperti: kepala/wakil kepala daerah, kepala/wakil kepala dinas, camat, lurah/kades, Kapolda, Kapolres.

2.2.2. Aspek 2: HAK-HAK POLITIK

Aspek hak-hak sipil dalam IDI terdiri dari 2 (dua) variabel yaitu:

1. Hak Memilih dan Dipilih

- Indikator 11. Kejadian di mana hak memilih dan dipilih masyarakat terhambat.

- Indikator 12. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok dengan keterbatasan akses tidak dapat menggunakan hak memilih
- Indikator 13. Kualitas daftar pemilih tetap.
- Indikator 14. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu.
- Indikator 15. Anggota perempuan terhadap total anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk variabel hak memilih dan dipilih, indikator 11, 12, 13, 14 memiliki sumber data yang sama, yaitu hasil Pemilu legislatif tahun 2014. Dengan demikian, seluruh data untuk indikator tersebut pada dasarnya sudah ditemukan, sehingga enumerator tidak perlu mencari lagi. Kelompok dengan keterbatasan akses termasuk orang cacat, dirawat di rumah sakit, pengungsi, penjara, atau sejenisnya.

Khusus indikator 15, enumerator memungkinkan perubahan dapat disebabkan adanya anggota DPRD yang sakit tetap atau meninggal dunia sehingga dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW)

2. Partisipasi Politik Dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan

- Indikator 16. Demonstrasi yang bersifat kekerasan.
- Indikator 17. Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan

Pengaduan masyarakat merupakan gambaran keluhan masyarakat mengenai pelayanan pemerintah. Namun, disisi lain

pengaduan masyarakat bisa merupakan cerminan peran masyarakat baik sebagai individu maupun sebagai kelompok dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Topik pengaduan dapat berupa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah, prosedur atau tata cara, tingkah laku aparat penyelenggara maupun hasil-hasil kerja pemerintah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Misalnya keluhan atau tuntutan yang diarahkan terhadap pelayanan umum oleh pemerintah, misalnya perbaikan jalan, persoalan lahan, kesewenangan aparat, pelayanan puskesmas, urusan pendidikan, hingga persoalan seputar pengurusan administrasi.

2.2.3. Aspek Lembaga Demokrasi

Lembaga Demokrasi adalah institusi-institusi publik dan pemerintahan yang berfungsi/berperan mendorong terbentuknya negara yang demokratis. Institusi-institusi negara yang demokratis terdiri dari: eksekutif, legislatif dan yudikatif. Aspek lembaga demokrasi dalam IDI terdiri dari 5 (lima) variabel yaitu, pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, dan peran peradilan yang independen. Indikator-indikator sebagai berikut :

1. Pemilu yang Bebas dan Adil (tidak perlu dicari lagi)

- Indikator 18. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu
- Indikator 19. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara

2. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

- Indikator 20. Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD

Alokasi Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan didalam APBD. Alokasi anggaran yang dicatat adalah besaran angka alokasi, bukan besaran angka realisasi.

Alokasi Anggaran Kesehatan adalah alokasi anggaran pada fungsi kesehatan didalam APBD. Alokasi anggaran yang dicatat adalah besaran angka alokasi, bukan besaran angka realisasi.

Sumber data dari alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan adalah salinan lampiran Perda penetapan APBD Perubahan dan salinan lampiran pertanggungjawaban kepala daerah (LKPJ).

- Indikator 21. Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total Perda yang dihasilkan

Perda Inisiatif adalah peraturan daerah yang rancangannya berasal dari inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perda inisiatif yang dicatat dalam indikator ini adalah seluruh perda yang diterbitkan pada tahun 2018. Sedangkan cakupan dari indikator ini adalah seluruh Perda yang diterbitkan oleh DPRD provinsi.

- Indikator 22. Rekomendasi DPRD kepada eksekutif

Rekomendasi DPRD adalah masukan dari legislatif kepada eksekutif yang memberikan perbaikan kebijakan.

3. Peran Partai Politik

- Indikator 23. Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu.

Kaderisasi adalah proses pendidikan jangka panjang untuk menanamkan nilai-nilai tertentu (yang diyakini bersama sebagai pembentuk watak dan karakter organisasi) kepada seorang kader (anggota) sebagai calon penerus organisasi, baik sifatnya berkala maupun insidental.

- Indikator 24. Perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi

Kepengurusan Parpol yang dicatat adalah kepengurusan selama periode tahun 2018. Cakupan dari indikator ini adalah kepengurusan partai politik yang menjadi tiga terbesar yang mendapatkan kursi atau memiliki wakilnya di DPRD provinsi.

4. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah

- Indikator 25. Kebijakan pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN
- Indikator 26. Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah

5. Peran Peradilan yang Independen

- Indikator 27. Keputusan hakim yang kontroversial

Keputusan Hakim yang Kontroversial adalah keputusan pengadilan yang dapat menimbulkan protes dari masyarakat karena keputusan

tersebut dianggap tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

- Indikator 28. Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi

Penghentian Penyidikan adalah penghentian penyidikan oleh jaksa atau polisi yang tidak memuaskan rasa keadilan masyarakat mengindikasikan peradilan yang tidak independen.

2.3 Metode Pengumpulan Data IDI

Dua Karakteristik Utama Dari Praktik Demokrasi diantaranya:

1. Pertama: telah terjadi perluasan peran masyarakat (society)
2. Kedua: reformasi kelembagaan demokrasi telah dilakukan secara massif, tidak saja dalam bentuk memperbaiki struktur dan fungsi dari lembaga-lembaga yang telah ada, tetapi juga menghadirkan sejumlah lembaga baru

IDI menggunakan metode triangulasi yakni mengkombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi silang (*cross validate*) data yang akan didapat dari metode yang lain. Metode pengumpulan data dikelompokkan dalam 2 pendekatan yaitu :

- Pendekatan kuantitatif

Pendekatan kuantitatif dikumpulkan melalui review koran dan review dokumen, sebagai rujukan awal dan sumber data utama.

- Pendekatan kualitatif

Pendekatan kualitatif dikumpulkan melalui Focus Group Discussion (FGD) dan Wawancara Mendalam (WM).

Prinsip Dasar Penyusunan IDI:

IDI hanya mengukur perkembangan demokrasi politik di provinsi

- IDI hanya mengindikasikan potret demokrasi di provinsi; bukan suatu studi etnografis yang sangat detil yang ditujukan untuk memberikan gambaran secara utuh dan lengkap mengenai demokrasi provinsi
- IDI mengukur demokrasi dari dua sisi, yaitu sisi negara (pemerintah) dan masyarakat
- IDI bukan merupakan tujuan akhir tetapi merupakan tujuan antara untuk merealisasikan kehidupan masyarakat yang bebas, aman, adil, sejahtera

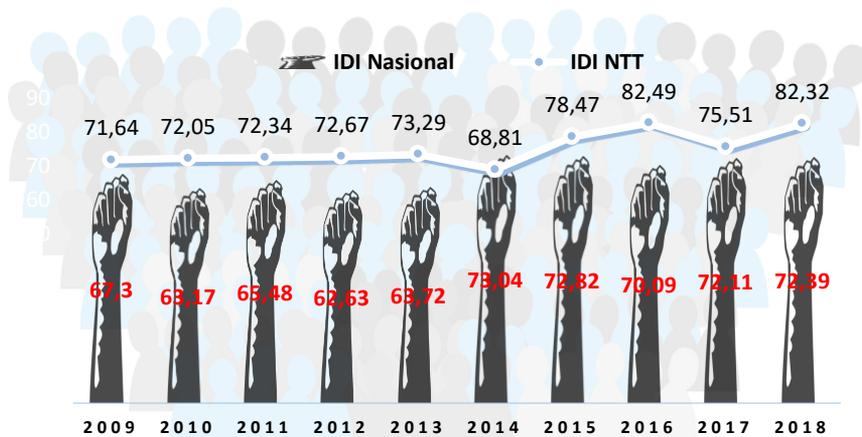
IDI sebagai alat ukur objektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. Konsep Demokrasi maupun metode pengukurannya, mempertimbangkan kekhasan provinsi.

BAB III PEMBAHASAN

4.1 Perkembangan IDI Nusa Tenggara Timur dan Keterbandingan dengan IDI Nasional , 2009-2018

Dinamika 10 tahun capaian demokrasi di Nusa Tenggara Timur dalam prespektif IDI pada akhirnya membawa demokrasi IDI NTT pada klasifikasi indeks “baik” setelah sebelumnya tahun 2016 pernah berada pada kalsifikasi “baik”. Angka IDI menunjukkan bahwa sejak tahun 2009 hingga 2018, capaian tingkat demokrasi di Nusa Tenggara Timur terlihat berfluktuasi dalam rentang klasifikasi “sedang” dan “baik”. Pada periode tahun 2009-2018, angka IDI berfluktuasi dalam rentang klasifikasi “sedang”, kecuali tahun 2016 dan 2018 IDI NTT telah mencapai klasifikasi “baik”. Berarti selama 10 tahun, capaian demokrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat dinamis dan tidak pernah berada dalam kategori buruk.

Gambar 1. Perkembangan IDI Nusa Tenggara Timur dan IDI Nasional , 2009-2018



Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jika dijabarkan dalam angka, IDI Nusa Tenggara Timur pada tahun 2018 mencapai angka indeks, 82,32, meningkat 6,81 poin dibandingkan nilai indeks sebelumnya. Nilai indeks tertinggi selama tahun 2009-2018 terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 82,49 dan yang terendah terjadi pada tahun 2014, sebesar 68,81. Nilai indeks pada gambar 1. menunjukkan bahwa angka IDI Nusa Tenggara Timur memiliki tren positif.

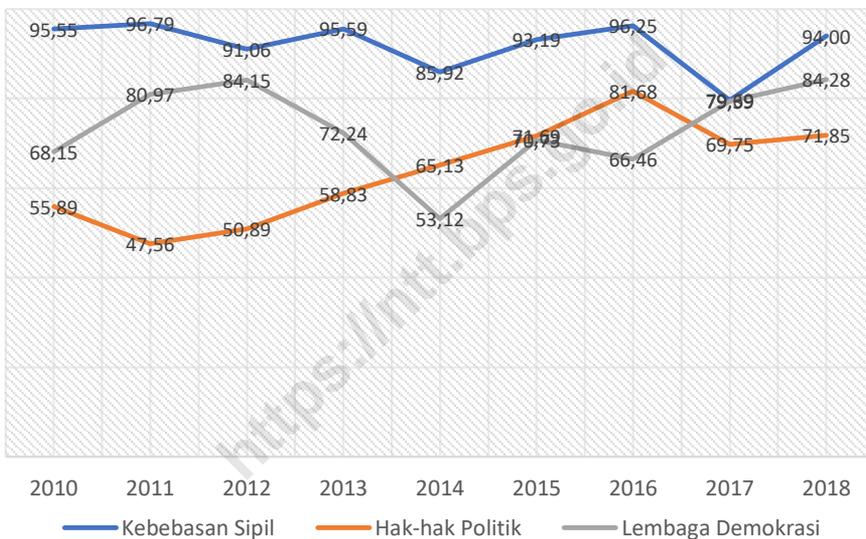
Keterbandingan nilai indeks dengan rerata indeks seluruh provinsi, dapat terlihat bahwa nilai IDI NTT dari tahun ke tahun selalu lebih tinggi dibandingkan IDI nasional, kecuali pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan capaian demokrasi NTT lebih baik jika dibandingkan capaian demokrasi pada level nasional, yang dilihat dari rerata seluruh provinsi. Gambaran demokrasi yang dinamis dapat terlihat, baik dalam regional NTT maupun dalam level nasional. Namun, jika dilihat keterbandingan klasifikasi dalam kurun waktu tersebut, NTT selalu berada dalam kategori sedang kecuali pada tahun 2016 dan tahun 2018, dimana NTT berhasil mencapai demokrasi dalam kategori baik. Sedangkan dalam level nasional, indeks demokrasi selalu dalam kategori sedang.

4.2 Perkembangan Aspek IDI Nusa Tenggara Timur 2009-2018

Kinerja demokrasi di Provinsi NTT yang dinamis, tidak hanya dipahami sebagai indeks berkategori sedang dan baik. Namun, IDI NTT juga menunjukkan perbedaan dan dinamika capaian antar aspek yang perlu menjadi perhatian bagi seluruh penyelenggara demokrasi, sebab

ketiga aspek tersebut menjadi komponen dalam penyusun indeks demokrasi. Pada tahun 2018, IDI Nusa Tenggara Timur mencapai klasifikasi baik untuk dua aspek yakni Aspek Kebebasan Sipil dan Aspek Lembaga Demokrasi, sedangkan Aspek Hak-Hak Politik hanya berada pada klasifikasi sedang.

Gambar 2. Perkembangan Aspek IDI Nusa Tenggara Timur 2009-2018



Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nilai indeks Aspek Kebebasan Sipil, Aspek Hak-Hak Politik, dan Aspek Lembaga Demokrasi masing-masing sebesar 94,00; 84,28; dan 71,85. Ketiga aspek tersebut, Aspek Kebebasan Sipil, Aspek Hak-hak Politik, dan Aspek Lembaga Demokrasi mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, masing-masing sebesar 14,31 ; 4,89; dan 2,1.

Jika melihat gambar 2, dari ketiga aspek pembangun IDI di Provinsi NTT sepanjang tahun 2009-2018, masing-masing menunjukkan nilai indeks yang berfluktuasi, sejalan dengan demokrasi yang memang bersifat dinamis. Sepanjang periode 2009-2018, nilai Indeks Kebebasan Sipil terhadap nilai IDI NTT merupakan yang paling besar jika dibandingkan Aspek Hak-Hak Politik dan Aspek Lembaga Demokrasi. Masih dalam periode waktu tersebut, dari sisi Aspek Kebebasan Sipil, nilai indeks tertinggi terjadi pada tahun 2011 yakni sebesar 96,79 dan terendah pada tahun 2017 sebesar 79,69. Dalam rentang nilai tersebut, menggambarkan bahwa kebebasan sipil di Provinsi NTT selalu dalam kategori baik kecuali tahun 2017 sebesar 79,69, masuk kategori indeks sedang dengan nilai yang mendekati klasifikasi baik. Ini menunjukkan bahwa secara umum, dalam perspektif IDI, kebebasan sipil masyarakat NTT dalam berdemokrasi masih dalam kategori baik.

Meskipun demikian, sedikit ada perbedaan pada aspek Hak-Hak Politik yang trennya terus meningkat sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 dan kembali turun pada tahun 2017, kemudian meningkat lagi di tahun 2018. Peningkatan nilai indeks tersebut menggambarkan kemajuan pesat di Provinsi NTT dalam mewujudkan hak-hak politiknya baik dari variabel hak memilih dan dipilih maupun partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Hal ini ditunjukkan oleh perubahan nilai indeks dari kategori buruk selama tahun 2009-2012 dan mampu mencapai kategori sedang pada 2013-2015 serta menuju kategori baik di tahun 2016. Meski demikian, dinamika demokrasi tercermin dengan menurunnya indeks aspek ini, di tahun

2017 menjadi 69,75, kemudian meningkat lagi di tahun 2018 menjadi 71,85. Nilai indeks terendah terjadi pada tahun 2011, dengan nilai indeks sebesar 47,56 dan nilai indeks tertinggi di tahun 2016 sebesar 81,68.

Berbeda dengan aspek kebebasan sipil dan hak-hak politik, di tahun 2018 nilai indeks lembaga demokrasi meningkat hingga 79,39, naik 12,93 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Trend indeks ini sepanjang periode tersebut memang berfluktuasi. Bahkan nilai indeks aspek lembaga demokrasi pernah berada pada kategori buruk pada tahun 2014 dengan nilai indeks sebesar 53,12. Nilai indeks tertinggi aspek ini terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 84,15.

4.3 Perkembangan Nilai Indeks 11 Variabel IDI NTT Tahun 2017-2018

Secara umum, variabel-variabel dalam IDI NTT 2018 menghasilkan nilai indeks yang bervariasi. Nilai indeks variabel tertinggi terdiri dari variabel Kebebasan Berkeyakinan, Peran Parpol dan Peran Peradilan yang Independen, dengan nilai indeks masing-masing sebesar 100, sedangkan variabel dengan capaian nilai indeks terendah dalam IDI NTT 2018 yakni, Variabel Peran Birokrasi Pemerintahan, sebesar 60,82.

Jika dibandingkan dengan tahun 2017, seluruh variabel IDI Dari mengalami peningkatan nilai indeks dalam IDI NTT Tahun 2018, Peningkatan nilai indeks tertinggi selama tahun 2017-2018 dicapai oleh variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat dan variabel peran demokrasi pemerintahan masing-

masing sebesar 85,16; 43,14; dan 16,61, Peningkatan nilai indeks keseluruhan variabel ini menjadi andil nilai IDI Nusa Tenggara Timur meningkat 6,81 poin dan masuk dalam klasifikasi indeks baik.

Tabel 1. Nilai Indeks 11 Variabel IDI NTT Tahun 2017-2018

No	Nama Variabel	2017	2018	Selisih
I	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	12,5	97,66	85,16
II	Kebebasan Berpendapat	50	93,74	43,74
III	Kebebasan Berkeyakinan	96,26	100	3,74
IV	Kebebasan dari Diskriminasi	74,38	78,14	3,76
V	Hak Memilih dan Dipilih	73,75	75,22	1,47
VI	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	65,76	68,48	2,72
VII	Pemilu yang Bebas dan Adil	97,47	97,47	0
VII I	Peran DPRD	61,63	67,28	5,65
IX	Peran Partai Politik	100	100	0
X	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	44,21	60,82	16,61
XI	Peran Peradilan yang Independen	100	100	0

Sumber data: BPS Provinsi NTT

4.4 Perkembangan Nilai Indeks Masing-Masing Indikator Aspek Kebebasan Sipil IDI NTT Tahun 2017-2018

Pada tahun 2018, indikator dalam Aspek Kebebasan Sipil 8 yang capaian demokrasi berada pada klasifikasi baik dan masing-masing 1 indikator pada dalam klasifikasi sedang dan baik. Dari 10 indikator terdapat 6 indikator yang telah mencapai nilai 100 diantaranya indikator 1, indikator 3, indikator 5, indikator 6, indikator 7, indikator 8. Meskipun capaian demokrasi pada beberapa indikator aspek kebebasan sipil sudah mencapai nilai baik, tetapi masih terdapat satu indikator yang masih berada pada kategori buruk yakni indikator ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, dengan nilai sebesar 41,67.

Jika dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat 8 indikator yang mengalami peningkatan indeks dan hanya 2 indikator yang mengalami penurunan indeks. Sebagaimana terlihat dari tabel 2, peningkatan nilai indeks terjadi pada indikator 1, indikator 3, indikator 4, indikator 5, indikator 6, indikator 7, indikator 8, dan indikator 9. Adapun indikator yang mengalami penurunan indeks terjadi pada indikator 2, ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat dan indikator 10, ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, masing-masing sebesar 18,75 poin dan 33,33 poin.

**Tabel 2. Nilai Skor Indikator-indikator
Aspek Kebebasan Sipil Tahun 2017-2018**

No	Indikator	2017	2018	Selisih
01	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	0	100,00	100
02	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	81,25	-18,75
03	Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	50,00	100,00	50,00
04	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	50,00	62,50	12,50
05	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	100,00	100,00	0
06	Tindakan/ Pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	90,63	100,00	9,37
07	Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama	85,00	100,00	15,00
08	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok	100,00	100,00	0
09	Tindakan/ Pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender dst	37,50	90,63	53,13
10	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender	75,00	41,67	-33,33

Sumber data: BPS Provinsi NTT

4.4 Perkembangan Nilai Indeks Masing-Masing Indikator Aspek Hak-hak Politik IDI NTT Tahun 2017-2018

Tabel 3. Nilai Skor Indikator-indikator Aspek Hak-hak Politik Tahun 2017-2018

No	Indikator	2017	2018	Selisih
11	Hak memilih atau dipilih terhambat	96,79	96,79	0
12	Ketersediaan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih	60,00	60,00	0
13	Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)	75,14	75,14	0
14	Voters turnout	76,56	76,56	0
15	Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi	30,77	46,15	15,38
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	31,52	36,96	5,44
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	100,00	100,00	0

Sumber data: BPS Provinsi NTT

Nilai indeks Aspek Hak-hak politik untuk indikator 11, 12, 13, dan 14 merujuk pada pemilu legislatif tahun 2014 sehingga nilai indeksnya tetap hingga tahun 2019. Dengan demikian, IDI NTT tahun 2018 hanya mengukur indikator 15 untuk variabel hak memilih dan dipilih, serta 2 indikator pada variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan (indikator 16 dan indikator 17). Pada tahun

2018, indikator keterwakilan perempuan terhadap total anggota DPRD Provinsi di NTT, mengalami peningkatan nilai indeks sebesar 15,38 poin jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam IDI NTT 2017, skor untuk indikator ini adalah 30,77 sedangkan dalam IDI NTT 2018, skornya sebesar 46,15. Peningkatan nilai indeks tersebut diperoleh dari peningkatan jumlah perempuan terpilih pada DPRD Provinsi dan 15 kabupaten/kota di NTT.

Meskipun terdapat peningkatan nilai indeks, skor sebesar 46,15 menunjukkan bahwa jumlah perempuan terpilih menjadi anggota DPRD masih sangat kecil dan menjadikan indikator 15 ini berada dalam kategori buruk, Hal ini juga sejalan dengan fakta bahwa ada 5 kabupaten di NTT (Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores, Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Nagekeo) yang tidak memiliki perempuan terpilih dalam keanggotaan DPRD tahun 2017- 2018, Sedikitnya jumlah perempuan yang diajukan sebagai calon legislatif dalam Pemilu oleh partai politik atau bisa juga karena kurangnya penghargaan para pemilih terhadap caleg perempuan sehingga rendahnya pilihan masyarakat terhadap caleg perempuan,

Skor indikator 16 meningkat 5,44 dibandingkan skor tahun 2017, Ini sejalan dengan jumlah kasus yang meningkatkan skor indikator ini yakni, 16 kejadian pada tahun 2018, Beberapa kejadian yang mengurangi skor indikator 16 pada tahun 2018 terdiri dari kejadian menanam batang pisang di atas badan jalan sebagai bentuk protes terhadap kerusakan jalan; warga memalang dan memblokir

jalan; menyegel sekolah, massa demo bakar ban, protes hasil pilkada yang ricuh, Kejadian ini adalah bentuk protes masyarakat dengan cara-cara tidak sesuai dengan budaya demokrasi karena akan menghalangi, menghambat orang lain dalam beraktifitas, Penyampaian aspirasi tidak mestinya berbenturan atau merugikan pihak lain,

Aksi pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi NTT sebesar 100, menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan sangat baik, Laporan/ pengaduan terhadap penyelenggaraan pemerintah melalui media surat kabar sebanyak 857 pengaduan selama tahun 2018, Dari informasi ini, bisa disimpulkan bahwa masyarakat sebagai bagian dari penyelenggara demokrasi telah melaksanakan fungsi pengawasannya dengan baik selama tahun 2017-2018, digambarkan oleh nilai indeks yang telah mencapai 100,

4.4 Perkembangan Nilai Indeks Masing-Masing Indikator Aspek Lembaga Demokrasi IDI NTT Tahun 2017-2018

Aspek Lembaga Demokrasi yang terukur dalam 11 indikator menempati nilai indeks dalam rentang skor 14,29 - 100 pada tahun 2018. Indikator dalam Aspek Lembaga Demokrasi yang skornya menurun hingga skor 14,29 adalah indikator rekomendasi DPRD kepada eksekutif (indikator 22) sedangkan 5 indikator dengan skor 100 adalah indikator keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu (indikator 18). Indikator keputusan hakim yang kontroversial (indikator 27) dan indikator penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi (indikator 28). Khusus untuk

indikator 18 dan 19, variabel pemilu yang bebas dan adil masih merujuk pada pemilu 2014 jadi skor untuk indikator tersebut konstan hingga tahun 2019.

**Tabel 4. Nilai Skor Indikator-indikator
Aspek Lembaga Demokrasi Tahun 2017-2018**

No.	Indikator	2017	2018
18	Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	100	100
19	Kecurangan dalam penghitungan suara	94,94	94,94
20	Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan	74,97	76,24
21	Perda yang merupakan inisiatif DPRD	57,14	92,31
22	Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif	17,86	14,29
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu	100	100,00
24	Perempuan pengurus partai politik	100	100,00
25	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	86,84	73,68
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	8,33	50,00
27	Keputusan hakim yang kontroversial	100	100
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	100	100

Sumber data: BPS Provinsi NTT

Perkembangan indikator-indikator dalam Aspek Lembaga Demokrasi tahun 2017-2018, yang menarik untuk menjadi perhatian

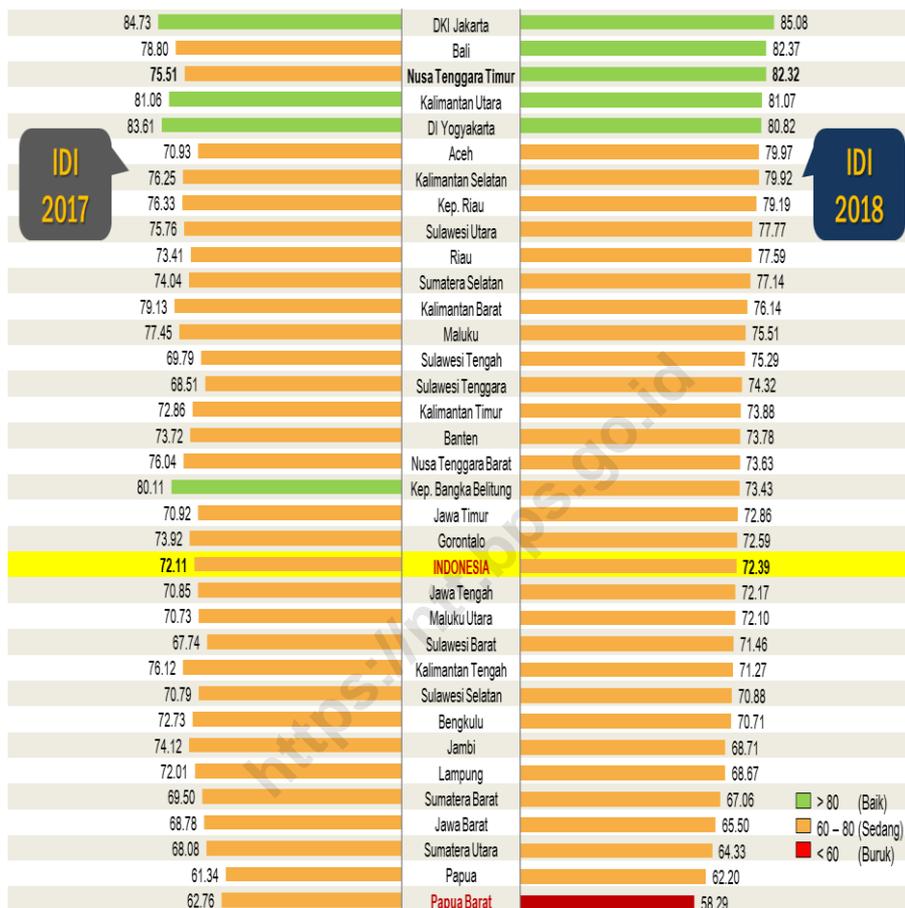
adalah dua indikator yang masih berada dalam kinerja demokrasi dengan kategori buruk diantaranya, indikator rekomendasi DPRD terhadap eksekutif dan indikator upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah. Dua indikator masih butuh perhatian karena masih dalam kinerja demokrasi kategori buruk, sementara 9 indikator lainnya sudah dalam klasifikasi indeks sedang dan baik.

Salah satu indikator dengan skor yang masih dalam kategori buruk adalah merupakan bagian dari variabel peran DPRD. Hal ini perlu menjadi koreksi bagi DPRD sebagai lembaga legislative. Dalam fungsi pengawasan DPRD yang diukur melalui skor indikator jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif, belum terlaksana dengan baik hingga tahun 2018. Skor indeks indikator tersebut sebesar 14,29 yang berarti bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak terlaksana dengan baik. Dalam aspek ini, peran DPRD sangat penting untuk menciptakan institusi yang demokratis terutama dalam fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Kinerja lembaga demokrasi lainnya yang perlu untuk ditingkatkan ke depannya adalah upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah, dengan skor sebesar 50,00. Perlu kiranya pemerintah daerah meningkatkan transparansi melalui *website* Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) yang sudah terintegrasi dengan *website* Pemda Provinsi NTT. Mengupdate data/konten TPAD sebagai wujud keterbukaan terhadap publik terkait penggunaan anggaran pemerintah.

4.5 Keterbandingan IDI NTT dengan Tahun 2017-2018

Gambar 3. Keterbandingan IDI Nusa Tenggara Timur



Sumber Data: BPS Provinsi NTT

Indikator-indikator dan penghitungan IDI di masing-masing provinsi bisa saja dibandingkan antar provinsi. Jika dilihat dari Gambar 4. nilai IDI NTT pada tahun 2018 telah mencapai nilai indeks sebesar 82,32 dan berada pada urutan ke tiga setelah Provinsi DKI Jakarta dan Bali. Namun, pada tahun 2017, nilai indeks mencapai 75,51 dan berada pada urutan ke tiga belas. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa

dalam kurun waktu 2017-2018 IDI NTT tidak hanya mengalami peningkatan nilai indeks (sebesar 6,81 poin) akan tetapi kinerja demokrasi juga mengalami peningkatan yang ditandai dengan pergeseran dari kategori sedang menjadi kategori baik, dan juga meningkatkan urutan/peringkat IDI dalam keterbandingan dengan provinsi lain dari urutan ketiga belas menjadi urutan ketiga.

<https://ntt.bps.go.id>

Lampiran

<https://ntt.bps.go.id>

Tabel 5. Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2009

Kode Provinsi	Provinsi	Indeks Keseluruhan	Aspek Demokrasi		
			Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga-Lembaga Demokrasi
1	Kalteng	77,63	98,45	60,50	78,69
2	Riau	75,85	93,14	65,40	70,68
3	DKI Jakarta	73,91	91,65	52,20	86,09
4	Kep. Riau	73,61	96,22	59,47	67,62
5	Gorontalo	73,50	96,05	56,39	73,32
6	Sumsel	72,52	95,42	56,07	69,83
7	Kalbar	72,38	98,29	53,46	69,85
8	Kaltim	72,31	98,22	54,78	67,57
9	NTT	71,64	95,55	51,46	73,63
10	Jawa Barat	71,07	85,84	68,48	56,61
11	Jambi	71,00	95,86	50,41	72,43
12	Sulut	70,94	92,23	58,50	63,91
13	Bali	70,35	93,97	49,82	73,24
14	Maluku	69,07	92,77	52,05	66,30
15	Sulbar	67,99	93,82	53,09	59,15
16	Banten	67,98	95,46	49,47	62,83
17	DIY	67,55	92,15	52,52	60,48
18	Lampung	67,47	90,57	51,81	63,27
19	Maluku Barat	67,21	93,61	46,30	67,23
20	Babel	67,01	96,51	48,29	59,65
21	Kalsel	66,63	68,24	62,63	70,95
22	Jawa Tengah	66,45	86,48	51,85	64,43
23	NAD	66,29	64,42	70,39	62,13
24	Sulteng	66,02	98,51	45,90	57,14
25	Bengkulu	64,76	94,26	54,03	44,70
26	Sultra	64,29	94,66	43,97	58,37
27	Papua	63,80	92,83	43,84	58,97
28	Papua Barat	63,06	93,14	37,09	66,48
29	Jawa Timur	62,49	83,30	50,96	54,64
30	Sulsel	61,48	82,94	42,36	64,88
31	Sumbar	60,29	63,06	53,57	67,48
32	Sumut	60,20	84,16	41,26	60,14
33	NTB	58,12	68,05	47,50	62,48
INDONESIA		67,30	86,97	54,60	62,72

Tabel 6. Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2010

Kode Provinsi	Provinsi	Indeks Keseluruhan	Aspek Demokrasi		
			Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga-Lembaga Demokrasi
1	DKI Jakarta	77,44	92,46	56,19	92,30
2	DIY	74,33	91,24	55,96	82,25
3	Sumsel	73,65	100,00	55,17	69,85
4	Kaltim	73,04	97,79	53,89	72,34
5	Bali	72,44	94,10	51,52	78,43
6	NTT	72,05	95,55	55,89	68,15
7	Riau	71,45	91,02	47,19	85,39
8	Kalteng	71,10	94,51	56,05	65,57
9	Kalsel	70,94	67,74	72,66	72,25
10	Bengkulu	70,78	94,40	64,35	51,29
11	Maluku	69,51	96,22	48,12	69,89
12	Kalbar	69,32	99,17	45,19	70,11
13	Lampung	67,80	94,39	53,90	56,44
14	Papua Barat	67,75	99,84	44,24	64,73
15	Sulbar	67,57	94,48	47,22	66,06
16	Sulteng	66,63	92,19	51,82	58,01
17	Babel	65,94	85,95	48,44	68,57
18	Sulut	65,94	92,98	44,90	65,34
19	Jambi	65,88	85,15	48,14	69,81
20	NAD	65,36	69,98	62,63	63,87
21	Gorontalo	64,97	82,55	51,72	63,90
22	Sumut	63,45	76,64	57,42	56,45
23	Jawa Tengah	63,42	84,83	46,29	63,70
24	Sumbar	63,04	58,34	63,90	67,59
25	Kep, Riau	62,89	87,04	39,80	69,20
26	Banten	60,60	83,17	38,70	66,99
27	Papua	60,26	90,72	31,76	67,22
28	Maluku Barat	59,92	92,59	30,82	65,06
29	Jawa Barat	59,41	74,41	46,74	60,67
30	NTB	58,13	67,22	46,48	65,19
31	Sulsel	56,67	78,19	32,40	68,17
32	Jawa Timur	55,12	78,48	42,06	46,47
33	Sultra	54,79	83,71	30,46	57,06
INDONESIA		63,17	82,53	47,87	63,11

Tabel 7. Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2011

Kode Provinsi	Provinsi	Indeks Keseluruhan	Aspek Demokrasi		
			Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga-Lembaga Demokrasi
1	DKI Jakarta	77,81	89,94	58,32	93,50
2	Kalteng	76,28	92,56	54,73	90,04
3	Kalbar	74,86	97,15	49,34	87,38
4	Bali	74,20	95,44	50,08	85,79
5	Lampung	74,08	93,14	61,15	70,64
6	NTT	72,34	96,79	47,56	80,97
7	DIY	71,67	87,22	52,35	82,81
8	Bengkulu	71,36	94,10	59,47	61,63
9	Sulut	71,19	98,44	52,86	66,03
10	Kep, Riau	70,78	87,15	56,00	73,66
11	Riau	70,65	83,12	52,90	83,18
12	Jambi	70,46	91,62	46,27	82,27
13	Maluku	68,38	90,70	46,14	75,61
14	Sumsel	67,92	84,05	49,41	77,05
15	Banten	67,37	80,41	44,57	87,18
16	Babel	67,13	88,27	47,11	72,33
17	Kalsel	66,47	56,33	64,25	82,76
18	Kaltim	66,37	91,84	45,12	68,10
19	Sulbar	66,36	94,80	42,65	68,26
20	Jawa Barat	66,18	78,92	46,42	81,55
21	Sumut	66,15	79,23	59,47	60,31
22	Jawa Tengah	65,59	84,05	46,29	73,04
23	Sulsel	65,31	80,97	39,33	86,87
24	Sumbar	65,02	60,57	59,21	79,83
25	Sulteng	64,00	92,23	37,01	71,36
26	Gorontalo	62,77	81,80	44,36	68,08
27	Papua Barat	61,78	93,59	43,99	50,03
28	Maluku Barat	59,17	90,04	32,61	62,56
29	Papua	59,05	87,73	29,43	70,04
30	Sultra	57,56	85,81	29,18	67,11
31	Jawa Timur	55,98	71,58	40,32	61,23
32	NAD	55,54	58,65	47,90	63,77
33	NTB	54,49	55,45	49,60	61,06
INDONESIA		65,48	80,79	47,54	74,72

Tabel 8. Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2012

Kode Provinsi	Provinsi	Indeks Keseluruhan	Aspek Demokrasi		
			Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga-Lembaga Demokrasi
1	DKI Jakarta	77,72	88,11	62,52	88,81
2	Sulut	76,50	95,64	58,65	80,77
3	Sumsel	73,17	93,26	55,21	76,42
4	DIY	72,96	87,39	55,52	82,52
5	NTT	72,67	91,06	50,89	84,15
6	Lampung	72,26	94,14	50,60	79,16
7	Bali	71,75	94,18	45,00	86,01
8	Kaltim	71,23	97,16	51,69	69,68
9	Babel	69,37	83,09	51,21	80,97
10	Jambi	68,81	86,23	46,60	82,18
11	Sulsel	68,55	87,07	43,74	84,66
12	Riau	67,00	80,21	47,16	81,89
13	Maluku Barat	66,83	88,15	50,13	66,55
14	Kalteng	65,78	68,44	51,05	85,82
15	Papua Barat	65,70	94,42	45,74	61,27
16	Kep, Riau	65,61	82,68	49,98	68,95
17	Kalbar	65,38	92,37	37,18	76,23
18	Banten	65,29	79,20	51,03	70,42
19	Sulteng	64,97	93,43	37,65	72,55
20	Jawa Tengah	63,79	75,03	46,29	77,46
21	Sulbar	63,65	88,67	35,92	76,22
22	Bengkulu	61,70	77,76	48,93	61,79
23	Kalsel	61,13	49,51	52,59	89,33
24	Sumbar	60,82	57,10	50,85	81,32
25	Papua	60,71	91,11	32,99	66,50
26	Maluku	59,68	76,05	45,08	62,27
27	Gorontalo	59,37	73,25	50,76	55,59
28	Sumut	58,51	73,85	49,82	53,01
29	NTB	57,97	58,31	49,60	70,85
30	Sultra	57,26	91,39	29,50	58,44
31	Jawa Barat	57,05	65,93	46,58	62,51
32	Jawa Timur	54,99	80,97	36,17	52,22
33	NAD	54,02	60,16	47,16	57,21
INDONESIA		62,63	77,94	46,33	69,28

Tabel 9. Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2013

Kode Provinsi	Provinsi	Indeks Keseluruhan	Aspek Demokrasi		
			Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga-Lembaga Demokrasi
1	Sumut	58,80	73,65	49,50	54,90
2	Sumsel	67,12	91,45	50,32	63,22
3	Sumbang	54,11	54,88	38,97	77,17
4	Sulut	73,11	92,44	62,55	65,56
5	Sultra	52,61	84,32	28,95	50,32
6	Sulteng	64,50	90,03	36,78	76,44
7	Sulse	65,20	81,30	50,62	68,10
8	Sulbar	64,02	88,51	44,05	64,94
9	Riau	68,37	77,71	52,19	82,32
10	Papua Barat	60,70	92,33	35,93	60,26
11	Papua	60,92	90,21	31,37	71,01
12	NTT	73,29	95,59	58,83	68,23
13	NTB	57,22	59,68	49,60	66,24
14	NAD	63,56	71,78	48,59	76,97
15	Maluku Barat	64,06	83,67	48,94	63,40
16	Maluku	66,23	81,52	50,53	71,95
17	Lampung	63,13	70,75	45,47	81,58
18	Kep. Riau	66,50	80,08	49,63	76,21
19	Kaltim	68,13	92,14	55,36	58,20
20	Kalteng	64,15	81,89	50,69	63,21
21	Kalsel	63,71	58,03	56,35	82,54
22	Kalbar	67,52	97,54	49,36	58,61
23	Jawa Timur	59,32	71,37	35,43	82,10
24	Jawa Tengah	60,84	79,18	46,29	60,89
25	Jawa Barat	65,18	79,84	46,74	76,05
26	Jambi	64,41	84,95	41,91	74,34
27	Gorontalo	67,21	79,31	58,26	66,22
28	DKI Jakarta	71,18	88,72	55,08	74,69
29	DIY	72,36	90,78	50,65	83,69
30	Bengkulu	59,17	71,57	49,28	59,28
31	Banten	69,79	81,39	51,03	85,00
32	Bali	72,22	92,55	52,87	77,38
33	Babel	68,79	85,16	50,60	77,09
INDONESIA		62,63	63,72	79,00	46,25

Tabel 10. Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2014

Kode Provinsi	Provinsi	Indeks Keseluruhan	Aspek Demokrasi		
			Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga-Lembaga Demokrasi
1	DKI Jakarta	84,70	91,72	73,94	92,97
2	Sulut	83,94	93,56	80,89	76,68
3	DIY	82,71	86,25	76,07	88,82
4	Kalbar	80,58	98,44	63,12	85,84
5	Kalteng	79,00	92,93	66,42	81,48
6	Kaltim	77,77	93,28	70,42	69,94
7	Jawa Tengah	77,44	87,87	67,08	80,77
8	Sulbar	76,69	90,22	63,64	80,39
9	Bali	76,13	92,16	61,27	79,56
10	Banten	75,50	81,10	63,68	87,22
11	Babel	75,32	89,80	56,48	87,01
12	Sulsel	75,30	86,27	73,99	63,58
13	Sumsel	74,82	86,09	63,57	78,53
14	Sulteng	74,36	86,56	59,01	83,42
15	Gorontalo	73,82	82,19	63,67	79,41
16	Maluku	72,72	90,85	60,03	70,09
17	NAD	72,29	69,76	63,94	88,73
18	Bengkulu	71,70	79,49	63,98	74,16
19	Lampung	71,62	72,06	63,69	83,66
20	Jawa Barat	71,52	83,95	65,22	65,89
21	Jambi	71,15	78,23	54,01	89,48
22	Kalsel	70,84	58,43	76,45	77,53
23	Jawa Timur	70,36	81,62	56,29	78,54
24	Sultra	70,13	90,89	53,20	70,92
25	NTT	68,81	85,92	65,13	53,12
26	Riau	68,40	74,35	59,74	74,69
27	Kep. Riau	68,39	82,47	58,35	66,61
28	Sumut	68,02	79,86	61,97	62,75
29	Maluku Barat	67,90	76,90	60,61	68,16
30	Papua Barat	65,65	97,93	39,29	66,93
31	Sumbar	63,99	47,21	61,82	88,56
32	NTB	62,62	58,73	62,08	68,38
33	Papua	62,15	85,69	42,51	63,75
INDONESIA		73,04	82,62	63,72	75,81

Tabel 11. Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2015

Kode Provinsi	Provinsi	Indeks Keseluruhan	Aspek Demokrasi		
			Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga-Lembaga Demokrasi
1	DKI Jakarta	85,32	89,64	83,19	83,26
2	DIY	83,19	90,41	77,98	82,38
3	Kaltim	81,24	93,07	82,74	63,99
4	Kalut	80,16	98,10	83,65	52,05
5	Bali	79,83	94,42	77,42	65,31
6	Sumsel	79,81	96,06	78,79	61,00
7	Sulut	79,40	86,71	77,92	72,53
8	NTT	78,47	93,19	71,69	70,73
9	Jawa Timur	76,90	85,26	67,44	81,39
10	Gorontalo	76,77	81,35	69,97	81,81
11	Sulteng	76,67	94,60	68,85	66,53
12	Kalbar	76,40	96,81	65,57	67,95
13	Kalsel	74,76	54,15	85,77	83,17
14	Bengkulu	73,60	78,50	68,45	75,61
15	Kalteng	73,46	85,07	68,31	67,05
16	Jawa Barat	73,04	79,10	81,89	51,37
17	Babel	72,31	81,25	66,95	69,60
18	Jambi	70,68	75,89	62,12	77,72
19	Kep. Riau	70,26	80,16	65,01	66,13
20	Jawa Tengah	69,75	79,44	67,28	61,48
21	Sultra	69,44	91,14	56,95	61,99
22	Sumut	69,01	82,02	62,17	63,52
23	Banten	68,46	74,28	63,72	68,66
24	Sulbar	68,25	81,88	61,16	62,37
25	Sulsel	67,90	69,38	64,25	71,84
26	NAD	67,78	74,81	63,98	64,97
27	Sumbar	67,46	52,99	69,77	82,01
28	Lampung	65,95	71,99	63,19	62,74
29	Maluku	65,90	76,04	63,20	57,43
30	Riau	65,83	66,46	66,61	63,80
31	NTB	65,08	51,59	61,11	88,36
32	Maluku Barat	61,52	73,53	61,00	47,25
33	Papua Barat	59,97	92,33	39,48	51,81
34	Papua	57,55	82,72	41,81	50,87
INDONESIA		72,82	80,30	70,63	66,87

Tabel 12. Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2016

Kode Provinsi	Provinsi	Indeks Keseluruhan	Aspek Demokrasi		
			Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga-Lembaga Demokrasi
1	DIY	85,58	90,00	81,59	86,37
2	Babel	83,00	87,65	81,09	80,20
3	NTT	82,49	96,25	81,68	66,46
4	Sumsel	80,95	91,17	81,94	66,53
5	Bali	78,95	96,94	69,60	71,18
6	Maluku	78,20	87,17	76,18	70,13
7	Gorontalo	77,48	82,35	75,54	74,42
8	Kalut	76,98	100,00	66,64	64,48
9	Sulut	76,34	96,31	70,42	60,62
10	Kalbar	75,28	83,29	75,70	64,54
11	Kalteng	74,77	84,98	70,66	68,43
12	Bengkulu	74,23	85,14	63,84	77,01
13	Kaltim	73,64	78,25	78,35	60,36
14	Kalsel	73,43	61,04	83,58	72,89
15	Maluku Barat	73,27	92,27	61,79	67,59
16	Kep, Riau	72,84	85,43	71,28	59,48
17	NAD	72,48	92,92	63,94	60,33
18	Sulbar	72,37	82,89	69,02	64,47
19	Jawa Timur	72,24	73,73	76,49	63,63
20	Sulteng	72,20	80,39	67,89	68,76
21	Riau	71,89	71,78	77,98	62,34
22	Banten	71,36	83,47	68,30	60,99
23	Sultra	71,13	88,07	55,51	74,66
24	DKI Jakarta	70,85	81,11	67,54	63,19
25	Jambi	68,89	84,39	65,63	54,58
26	Sulsel	68,53	75,54	61,51	70,86
27	Sumut	67,37	82,71	62,29	56,13
28	Jawa Barat	66,82	73,37	72,34	49,79
29	Jawa Tengah	66,71	66,06	67,24	66,69
30	NTB	65,41	65,06	62,08	71,13
31	Papua	61,02	92,15	41,13	53,45
32	Lampung	61,00	60,49	59,32	64,31
33	Papua Barat	60,35	93,67	38,05	53,85
34	Sumbar	54,41	51,01	54,33	58,82
INDONESIA		70,09	76,45	70,11	62,05

Tabel 13. Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2017

Kode Provinsi	Provinsi	Indeks Keseluruhan	Aspek Demokrasi		
			Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga-Lembaga Demokrasi
1	DKI Jakarta	84,73	87,73	80,86	87,12
2	D.I. Yogyakarta	83,61	93,25	82,31	73,55
3	Kalimantan Utara	81,06	98,57	68,54	78,93
4	Babel	80,11	83,07	82,30	72,89
5	Kalimantan Barat	79,13	97,15	76,36	60,85
6	Bali	78,80	95,51	66,80	76,85
7	Maluku	77,45	81,78	74,85	76,15
8	Kepulauan Riau	76,33	90,84	71,45	65,82
9	Kalimantan Selatan	76,25	60,16	81,09	88,79
10	Kalimantan Tengah	76,12	95,58	56,69	82,50
11	NTB	76,04	79,40	62,08	93,98
12	Sulawesi Utara	75,76	90,87	72,12	62,54
13	NTT	75,51	79,69	69,75	79,39
14	Jambi	74,12	86,81	62,08	77,27
15	Sumatera Selatan	74,04	90,83	63,90	69,03
16	Gorontalo	73,92	85,30	68,18	68,73
17	Banten	73,72	85,16	63,87	74,98
18	Riau	73,41	82,03	66,57	73,41
19	Kalimantan Timur	72,86	83,33	67,18	68,72
20	Bengkulu	72,73	88,51	59,42	74,03
21	Lampung	72,01	74,12	67,20	77,00
22	Aceh	70,93	87,27	63,94	61,47
23	Jawa Timur	70,92	78,98	60,98	76,57
24	Jawa Tengah	70,85	69,07	67,24	78,82
25	Sulawesi Selatan	70,79	77,48	64,58	72,23
26	Maluku Utara	70,73	90,19	65,84	54,02
27	Sulawesi Tengah	69,79	90,04	55,88	66,44
28	Sumatera Barat	69,50	61,66	61,08	92,72
29	Jawa Barat	68,78	73,61	71,02	59,16
30	Sulawesi Tenggara	68,51	77,66	60,49	69,74
31	Sumatera Utara	68,08	74,75	62,29	68,87
32	Sulawesi Barat	67,74	73,56	60,84	71,39
33	Papua Barat	62,76	92,42	39,05	63,14
34	Papua	61,34	89,09	42,16	56,91
INDONESIA		72,11	78,75	66,63	72,49

Tabel 14. Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2018

Kode Provinsi	Provinsi	Indeks Keseluruhan	Aspek Demokrasi		
			Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga-Lembaga Demokrasi
1	DKI Jakarta	85,08	95,09	75,43	87,82
2	Bali	82,37	94,72	68,08	89,55
3	Nusa Tenggara Timur	82,32	94,00	71,85	84,28
4	Kalimantan Utara	81,07	97,36	75,80	68,95
5	DI Yogyakarta	80,82	90,60	75,07	77,66
6	Aceh	79,97	96,79	68,09	77,67
7	Kalimantan Selatan	79,92	69,26	83,03	88,37
8	Kepulauan Riau	79,19	91,05	77,54	66,90
9	Sulawesi Utara	77,77	88,90	69,53	76,86
10	Riau	77,59	86,88	62,77	89,47
11	Sumatera Selatan	77,14	83,13	73,12	76,01
12	Kalimantan Barat	76,14	93,87	64,01	73,08
13	Maluku	75,51	81,38	72,86	72,32
14	Sulawesi Tengah	75,29	91,90	54,94	86,72
15	Sulawesi Tenggara	74,32	79,77	67,59	78,16
16	Kalimantan Timur	73,88	90,99	61,38	72,22
17	Banten	73,78	86,59	60,11	79,40
18	Nusa Tenggara Barat	73,63	78,28	62,08	86,11
19	Babel	73,43	80,95	73,56	63,76
20	Jawa Timur	72,86	77,21	67,45	75,97
21	Gorontalo	72,59	79,33	64,95	76,26
22	Jawa Tengah	72,17	76,21	66,92	75,42
23	Maluku Utara	72,10	78,94	62,39	78,92
24	Sulawesi Barat	71,46	87,41	55,05	77,45
25	Kalimantan Tengah	71,27	90,09	50,46	80,65
26	Sulawesi Selatan	70,88	72,44	64,05	79,75
27	Bengkulu	70,71	78,77	62,18	74,13
28	Jambi	68,71	72,88	62,76	72,92
29	Lampung	68,67	77,29	59,53	72,35
30	Sumatera Barat	67,06	55,32	62,84	88,52
31	Jawa Barat	65,50	74,90	64,78	54,80
32	Sumatera Utara	64,33	76,54	62,61	51,69
33	Papua	62,20	84,36	47,90	57,05
34	Papua Barat	58,29	82,11	40,11	57,21
INDONESIA		72,39	78,46	65,79	75,25

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jl. R. Suprpto No. 5 Kupang - 85111

Telp (0380) 826289, 821755

Faks (0380) 833124

Mailbox : pst5300@bps.go.id, bps5300@bps.go.id

ISSN 2528-2131



9 772528 213002 >